

PENGARUH UPAH MINIMUM DAN DAYA BELI MASYARAKAT SETIAP PROVINSI TERHADAP KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPH PASAL 21 DI INDONESIA

Yessica Donna Amisa¹, R. Bambang Dwi Waryanto²

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}

Email : yessicadonna@gmail.com¹

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang menjadi pendapatan Negara. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk menyediakan fasilitas umum yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta sehingga perlu diperhatikan pelaksanaannya agar tidak membebani masyarakat namun bisa menguntungkan bagi Negara. Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kenaikan upah minimum dan daya beli masyarakat setiap provinsi terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21 di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang dipakai adalah data sekunder dengan jenis data time series pertahun selama periode 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Analisis regresi linier berganda, Analisis korelasi, Koefisien determinasi (R^2), Uji t dan Uji F. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upah minimum dan daya beli masyarakat setiap provinsi di Indonesia memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kenaikan PTKP.

Kata kunci: Upah minimum, Daya beli dan Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi yang harus dipenuhi subjek pajak kepada negara yang sesuai dengan undang-undang dengan sifat yang memaksa dan tidak secara langsung merasakan dampaknya dan pajak dipakai demi kepentingan Negara untuk kemakmuran warga Negara Indonesia (Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007). Saat menghitung pajak PPh pasal 21, PTKP menjadi pengurang dari total penghasilan bruto (penghasilan kotor). Perubahan PTKP di Indonesia telah dilakukan beberapa kali. Peraturan mengenai besaran PTKP diawali dengan diterbitkannya UU No.7 Tahun 1983 dengan besaran PTKP Rp 960.000. Lalu pada tahun 1993 dilakukan perubahan untuk pertama kali dengan diterbitkannya KMK No.928/KMK.04/1993 mengenai perubahan PTKP yang mulai efektif pada tahun 1993 yang besaran PTKP Rp 1.728.000. Perubahan kedua di tahun 1994 diterbitkannya UU Nomor 10 tahun 1994 dengan besaran PTKP Rp 1.728.000 yang mulai diberlakukan pada awal tahun 1995.

Setelah perubahan pada 1994, PTKP terus mengalami kenaikan yaitu tahun 1998 diterbitkan KMK No. 361/KMK.04/1998 dengan besaran PTKP Rp 2.880.000 yang diberlakukan pada 1 Januari 1999. Pada tahun 2000 menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2000 dengan besaran PTKP Rp 2.880.000 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2001, Pada tahun 2004 melalui KMK No.564/KMK.03/2004 pemerintah kembali melakukan perubahan PTKP menjadi sebesar Rp 12.000.000 yang berlaku pada 1 Januari 2005, Pada tahun 2005 melalui PMK No.137/PMK.03/2005 pemerintah menaikkan PTKP menjadi Rp 13.200.000 yang diberlakukan pada 1 Januari 2006, Tahun 2008 melalui UU Nomor 36 Tahun 2008 PTKP mengalami peningkatan menjadi Rp 15.840.000. Pada tahun 2012 besaran PTKP meningkat sebesar Rp 24.300.000 melalui PMK No.162/PMK.011/2012 yang diterapkan pada 1 Januari 2013, kemudian pada 2015 PTKP mengalami kenaikan menjadi Rp 36.000.000 melalui Peraturan menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010.2015 yang

mulai berlaku pada tahun yang sama dengan penentuan peraturan PTKP. Pada tahun 2016 perubahan PTKP mengalami kenaikan menjadi Rp 54.000.000 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang masih digunakan pada tahun 2020. (<http://www.ortax.org>)

Kenaikan PTKP tidak setiap tahun mengalami perubahan namun upah minimum provinsi di beberapa provinsi terjadi kenaikan dalam setiap tahun dan kenaikan upah minimum juga berdampak peningkatan daya beli masyarakat.

Terdapat 4 Penelitian terdahulu dijadikan referensi antara lain (1) Achmad Husaini dan Sunarti dengan variabel daya beli dan PTKP di analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasilnya kenaikan PTKP tidak memberikan pengaruh yang signifikan (2) Krista yiwati (2015), dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode yuridis dan menjelaskan bahwa PTKP yang naik akan otomatis meningkatkan pendapatan namun tidak berpengaruh meningkatkan daya beli masyarakat (3) harjo lukito (2017) memiliki tujuan untuk mengetahui efektif dan efisiensi PTKP dan pendapatan pekerja dengan menggunakan metode evaluasi sumatif, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan PTKP mempengaruhi peningkatan pendapatan (4) widiyanti (2017) dengan menggunakan metode analisis deskriptif peneliti ingin mengetahui kebijakan pemerintah dalam hal PTKP melindungi pekerja atau tidak dan hasil penelitiannya PTKP tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan karena kenaikan PTKP juga diikuti oleh inflasi.

Rumusan Masalah

1. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kenaikan PTKP?
2. Apakah daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan PTKP PPh pasal 21?

3. Apakah upah minimum dan daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21?

Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui upah minimum berpengaruh terhadap perubahan PTKP PPh Pasal 21?
2. Untuk mengetahui daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21?
3. Untuk mengetahui upah minimum dan daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21?

TELAAH PUSTAKA

Landasan teori

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pasal yang mengatur mengenai pemotongan gaji jasa atau gaji pekerjaan pada tahun berjalan. Perhitungan PPh pasal 21 menggunakan PTKP. Besarnya PTKP ditetapkan berdasarkan kondisi pada 1 Januari atau awal bulan dari bagian tahun kalender. Besarnya PTKP pegawai yang baru, pegawai luar negeri yang baru datang dan berada di daerah pabean dalam bagian tahun kalender. Perhitungan PPh pasal 21 yaitu jumlah penghasilan kotor dikurangi PTKP atas diri sendiri ditambah status menikah ditambah lagi dengan tanggungan keluarga paling banyak 3 orang yaitu keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya.

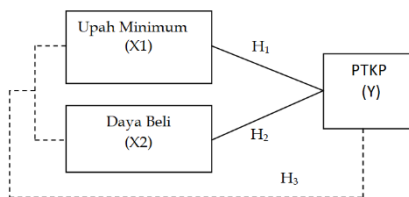
Upah Minimum Dan Daya Beli

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Permenakertrans) no 7 tahun 2013, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh pengusaha dan

pelaku industri sebagai standar minimum dalam memberi upah pekerjaanya.

menurut Dr. Supawi pawengan (2016) dalam Erni dan sukarni (2019) Daya beli masyarakat adalah kemampuan masyarakat sebagai konsumen dalam belanja barang atau membayar jasa yang dibutuhkan. Daya beli masyarakat dapat di ukur dari indikator harga konsumen dan indikator harga.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 :Kerangka Konseptual

Penjelasan mengenai kerangka konseptual diatas :

- = Berpengaruh secara parsial
 ---- =Berpengaruh Secara Simultan

HIPOTESIS PENELITIAN

- H1= Upah minimum berpengaruh terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21 di Indonesia.
 H2= Daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21 di Indonesia
 H3= Upah minimum dan daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap kenaikan PTKP PPh Pasal 21 di Indonesia

METODE

Populasi

Populasi penelitian ini adalah Upah minimum dan daya beli masyarakat Indonesia.

Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah upah minimum dan daya beli

masyarakat periode 2014 -2018 di 34 provinsi di Indonesia .

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* yaitu *cluster sampling*. *Cluster sampling* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upah minimum dan daya beli di 34 provinsi di Indonesia.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 macam,yaitu:

1. Variabel bebas, dalam penelitian ini upah minimum dan daya beli
2. Variabel terikat, dalam penelitian ini kenaikan PTKP

HASIL

Pengujian statistik deskriptif ditampilkan pada *Output* SPSS 20 tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Upah Minimum (X1)	169	910000	3647700	1897607,19	489293,827
Daya Beli (X2)	169	493088	2039157	973384,14	272321,552
PTKP (Y)	169	2025000	4500000	3714940,83	1019126,316
Valid N (listwise)	169				

Sumber : Output SPSS yang diolah,2020

Arifin, et al., 2017

Sampel penelitian terdapat 169 yang didapat padatahun 2014-2018. Hasil *output* SPSS pada tabel 1 memperlihatkan jika variabel independen X1menunjukkan nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar Rp 91.000 dan Rp 3.647.700. Nilai mean dari X1 sebesar Rp 1.897.607,19 dengan standar deviasi Rp 489.293,827. Hasil analisis deskriptif variabel X2 yaitu Daya Beli

menunjukkan nilai minimum Rp 493.088 dan nilai maximum Rp 2.039.157. Kemudian nilai mean X2 diperoleh Rp 973.384,14 dan standar deviasi Rp 272.321,552

Hasil analisis dari variabel Y yaitu PTKP menghasilkan nilai minimum dan maximum masing-masing sebesar Rp 2.025.000 dan Rp 4.500.000. Kemudian nilai mean PTKP senilai Rp 3.714.940,83 dengan standar deviasi Rp 1.019.126,316.

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda untuk hipotesis yang telah ditentukan terlebih dahulu diuji asumsi klasik.

Asumsi Klasik

Asumsi klasik ialah syarat yang perlu dipenuhi agar data bisa digunakan sebagai parameter penduga yang layak digunakan. Untuk menjadi parameter yang layak digunakan, data harus berdistribusi normal, terbebas dari multikolonieritas, terbebas dari heteroskedastisitas dan terbebas autokorelasi. Pengujian Normalitas diwajibkan untuk memenuhi kesimpulan yang valid. Untuk membuktikan data menghasilkan data yang normal, digunakan pengujian *one sampel kolmogorov-smirnov* dengan keputusan apabila nilai signifikansi $> 0,05$ (tingkat kepercayaan 95%) maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian pada Table 2 didapat nilai *test statistic one sample kolmogorov-smirnov* sebesar $0,130 > 0,05$, artinya bisa dikatakan normal (dapat dilihat pada tabel 2)

Tabel 2 :Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		169
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	868318,94920348
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,063
	Negative	-,090
Kolmogorov-Smirnov Z		1,168
Asymp. Sig. (2-tailed)		,130

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : *outputSPSS* yang diolah,2020.

Dalam mendeteksi ada gejala atau bebas multikolonieritas bisa melihat nilai tolerance dan VIF. Apabila nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai $VIF < 10$ maka model regresi baik karena terbebas multikolonieritas.

Tabel 3: Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Upah Minimum (X1)	,545	1,836
	DayaBeliX2	,545	1,836

a. Dependent Variable: PTKP (Y)

Sumber : *outputSPSS* yang diolah,2020.

Dari Tabel 3 terlihat variabel upah minimum dan daya beli masyarakat masing-masing mempunyai angka VIF sebesar 1,836 ($1,836 < 10$) dan nilai *tolerance* sebesar 0,545 ($0,545 > 0,10$). Sehingga bisa diambil keputusan bahwa data terbebas multikolonieritas. Dengan kata lain dapat dikatakan jika indikator kedua variabel tersebut bebas multikolonieritas.

Cara dalam mengetahui ada gejala autokorelasi atau bebas autokorelasi adalah menggunakan uji DW dengan melakukan perbandingan antara DW hitung dan DW tabel. Untuk lebih memahami dapat mengecek hasil *output spss* pada tabel 4 berikut:

Tabel 4: Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,734 ^a	,538	,533	754985,91219	1,862

a. Predictors: (Constant), DayaBeli, UpahMinimum

b. Dependent Variable: PTKP

Sumber : output spss yang diolah,2020.

Hasil *output* SPSS mengenai pengujian autokorelasi. Nilai DW menunjukkan hasil 1,862. Apabila dilihat dari DW untuk 2 variabel eksogenus ($k = 2$) dan banyak data adalah 169, untuk level signifikan 0,05 maka diperoleh DU sebesar 1,7724. Pengambilan keputusan bebas uji autokorelasi berdasarkan ketentuan $du < dw < 4 - du$ atau $1,7724 < 1,862 < 2,138$, sehingga bisa dikatakan bahwa bebas autokorelasi dan layak untuk digunakan.

Terjadi heteroskedastisitas atau bebas heroskedastisitas dapat digunakan pengujian park dengan ketentuan nilai sig pada tabel 5 lebih besar dari 0,05 mengartikan terbebas heteroskedastisitas

Tabel 5 : Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	42,689	11,598		3,681	,000
Upah Minimum (X1)	-7,007E-007	,000	-,151	-1,484	,140
Daya Beli (X2)	-2,523	2,040	-,126	-1,237	,218

a. Dependent Variable: LNRes1_2

Sumber : *output* spss yang diolah,2020.

Dilihat di tabel 5 menunjukkan tingkat signifikansi untuk upah minimum 0,140 ($0,140 > 0,05$) dan daya beli 0,218 ($0,218 > 0,05$). Sehingga data bebas heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian analisis regresi linier berganda dipakai untuk melihat keterkaitan antar variabel independen ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dengan variabel dependen (Y)

Tabel 6 : Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-8736734,893	4583510,004		-1,906	,058
Upah Minimum (X1)	,756	,187	,363	4,048	,000
Daya Beli (X2)	1844585,824	806044,404	,205	2,288	,023

a. Dependent Variable: PTKP (Y)

Sumber : *output* SPSS yang diolah,2020.

Dari tabel 6 diatas dapat diperoleh persamaan Analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -8.736.734,983 + 0,756X_1 + 1.844.585,824X_2$$

1. Konstanta sebesar -8.736.734,983
Nilai konstanta sebesar -8.736.734,983 menunjukkan jika variabel independen (Upah Minimum dan Daya Beli) bernilai nol, maka nilai dari PTKP sebesar -8.736.734,983
2. Koefisien regresi pengaruh upah minimum terhadap PTKP sebesar 0,756
Nilai koefisien X_1 sebesar 0,756 menunjukkan jika variabel upah minimum mengalami kenaikan 1 satuan maka diikuti oleh kenaikan PTKP sebesar 0,756 dengan anggapan variabel lain konsisten.
3. Koefisien regresi pengaruh daya beli masyarakat terhadap PTKP sebesar 1.844.585,824
Nilai koefisien X_2 sebesar 1.844.585,824 menunjukkan jika variabel daya beli mengalami kenaikan satu satuan, maka akan terjadi kenaikan PTKP sebesar 1.844.585,824 dengan anggapan variabel lain konsisten

Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mendeteksi keterkaitan antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). analisis ditampilkan tabel 7 berikut

Tabel 7 : Uji Analisis Korelasi

Correlations				
		Upah Minimum (X1)	DayaBeli (X2)	PTKP (Y)
Upah Minimum (X1)	Pearson Correlation	1	,675**	,501**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	169	169	169
DayaBeliX2	Pearson Correlation	,675**	1	,450**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	169	169	169
PTKP (Y)	Pearson Correlation	,501**	,450**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	169	169	169

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Sumber : output SPSS yang diolah,2020.

Tabel 8 : Interpretasi Koefisien Korelasi

Interpretasi Koefisien Korelasi		
Interval Koefisien	Tingkat hubungan	
0,00 - 0,199	Sangat Rendah	
0,20 - 0,399	Rendah	
0,40 - 0,599	Sedang	
0,60 - 0,799	Kuat	
0,80 - 1,000	Sangat Kuat	

Sumber : sugiyono (2017 : 184)

Dari tabel *output* 7 terlihat korelasi antara upah minimum dan PTKP menghasilkan nilai sebesar 0,501. Nilai tersebut jika dilihat pada tabel 8 menunjukkan hubungan yang sedang. Artinya antara upah minimum dan PTKP memiliki hubungan sedang.

Untuk korelasi antara daya beli dan PTKP menghasilkan angka sebesar 0,450, nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang sedang. Artinya terdapat hubungan yang sedang antara daya beli dan PTKP.

Sedangkan nilai korelasi untuk upah minimum dan daya beli menghasilkan angka sebesar 0,675. Nilai tersebut menunjukkan tingkat hubungan yang kuat. Artinya antara upah minimum dan daya beli masyarakat memiliki hubungan kuat.

Analisis Deterministik

nilai adjusted R square menunjukkan Nilai koefisien determinasi, nilai ini memperkirakan besaran pengaruh variabel terikat. Adapun *output* pengujiannya ditampilkan tabel 9 berikut :

Tabel 9 : Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,734 ^a	,538	,533	754985,91219	1,862

a. Predictors: (Constant), DayaBeli, UpahMinimum

b. Dependent Variable: PTKP

Sumber : output spss yang diolah,2020.

Hasil *output* SPSS tabel 9 menunjukkan bahwa variabel upah minimum dan daya beli mempengaruhi variabel PTKP sebesar 0,533 atau 53,3% sedangkan sisanya sebesar 46,7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t menggunakan perbandingan tingkat signifikansi t dengan α senilai 0,05:

Tabel 10 : uji t
Coefficients^a

Model	1	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-8736734,893	4583510,004		-1,906	,058
	Upah Minimum (X1)	,756	,187	,363	4,048	,000
	Daya Beli (X2)	1844585,824	806044,404	,205	2,288	,023

a. Dependent Variable: PTKP (Y)

Sumber : output spss yang diolah, 2020.

Menurut tabel 10 dapat dilihat upah minimum (X1) menunjukkan hasil nilai t hitung 4,048 dan nilai sig $0,000 < 0,050$, dapat diambil kesimpulan bahwa upah minimum (X1) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PTKP

Dari tabel 10 daya beli masyarakat (X2) menunjukkan hasil nilai t hitung 2,288 dan nilai signifikannya sebesar $0,023 < 0,050$, dapat disimpulkan daya beli masyarakat (X2) berpengaruh secara parsial terhadap PTKP

Adapun uji simultan ditampilkan pada tabel 11 berikut :

Tabel 11 : Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47819629420584,070	2	23909814710292,035	31,334	,000 ^b
	Residual	126668269987700,000	166	763061867395,783		
	Total	174487899408284,060	168			

a. Dependent Variable: PTKP (Y)

b. Predictors: (Constant), Daya Beli (X2), Upah Minimum (X1)

Sumber : output SPSS yang diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 11 nilai F hitung 31,334 dan besaran signifikan 0,000. Nilai signifikan $0,000 < 0,050$, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa upah minimum dan daya beli masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap PTKP

Pembahasan

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Perubahan Kenaikan PTKP

Hasil penelitian diperoleh upah minimum mempunyai pengaruh terhadap perubahan kenaikan PTKP yang signifikan. Konstanta sebesar 0,756 mengartikan jika upah minimum naik sebesar 1 satuan maka perubahan akan naik sebesar 0,756. Berdasarkan hasil analisis dapat ditentukan bahwa variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kenaikan PTKP pada tingkat kepercayaan 95% yang ditunjukkan dengan nilai sig lebih kecil daripada $\alpha=0,05$ ($0,000 < 0,05$)

Pengaruh Daya Beli Masyarakat Terhadap Kenaikan PTKP

Hasil penelitian diketahui bahwa daya beli masyarakat memiliki pengaruh terhadap perubahan kenaikan PTKP yang signifikan, konstanta sebesar 1.844.585,824 menunjukkan apabila daya beli masyarakat naik sebesar 1 satuan maka perubahan akan naik sebesar 1.844.585,824. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat ditentukan variabel daya beli masyarakat berpengaruh terhadap kenaikan PTKP pada tingkat kepercayaan 95% yang ditunjukkan nilai sig lebih kecil dari $\alpha=0,05$ ($0,023 < 0,05$).

Pengaruh Upah Minimum Provinsi Dan Daya Beli Masyarakat Terhadap Kenaikan PTKP

Hasil pengujian menunjukkan upah minimum provinsi dan daya beli masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kenaikan PTKP secara signifikan. Hal tersebut dijelaskan melalui nilai signifikansi $F = 0,000$ ($0,000 < 0,05$). Artinya meningkatnya upah minimum dan daya beli maka bisa diikuti dengan peningkatan PTKP.

SIMPULAN

1. Dari hasil analisis dan pembahasan ada pengaruh signifikan secara parsial dari upah minimum di 34 provinsi terhadap kenaikan PTKP periode 2014-2018
2. Dari hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari daya beli masyarakat setiap provinsi terhadap kenaikan PTKP periode 2014-2018
3. Dari hasil analisis dan pembahasan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara upah minimum provinsi dan daya beli masyarakat terhadap kenaikan PTKP periode 2014-2018

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozalli, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Badan pusat statistik. 2019. Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Barang (rupiah), 2014-2018: www.bps.go.id
- Gorby Jonathan, Achmad Husaini dan Sunarti. 2014. Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo). Jurnal mahasiswa perpajakan, volume 1, nomor 1. (<http://www.perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>, diakses tanggal 03 November 2019)
- Idris, Fahmi. 2018. Dinamika Hubungan Industrial. Sleman: CV Budi Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Susunan Dalam Satu Naskah Undang – Undang Perpajakan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2019. Penghasilan Kena Pajak. Jakarta: [Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id).
- Kementerian Tenaga Kerja. 2018. Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional Dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018 : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
- Lind dkk. 2014. Teknik-Teknik Statistika Dalam Bisnis Dan Ekonomi. Jakarta: Salemba Empat.
- Lukito, Harjo. 2017. Studi Efektifitas dan Efisiensi Kenaikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2016 Terhadap Penghasilan Buruh. *Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research* , Volume 1, Nomor 1. (<http://www.jurnal.stitradenwijaya.ac.id>, diakses tanggal 03 november 2019)
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan-Edisi Terbaru 2018. Jakarta: CV Andi Offset.
- Ortax. 2014. Penghasilan Tidak Kena Pajak: [Www.Ortax.Org](http://www.ortax.org).
- Pajak Online. 2018. PTKP dan Perhitungan Pajak Penghasilan : [Www.Online-Pajak.Com](http://www.online-pajak.com).
- Septian, Deny. 2018. BPS: Kenaikan UMP Dorong Daya Beli Tahun Depan: [Www.Liputan6.Com](http://www.liputan6.com).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Supramono. 2010. perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Susanti, Nurul. 2018. Pengaruh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21. Jurnal riset bisnis e-ISSN: 2598-005X, p-ISSN 2581-0863, Volume 2, 2019.

- issue 1, hal 32-49
(<http://www.jrb.univpancasila.ac.id>, diakses pada 5 november 2019)
- Tim Dosen Fakultas Ekonomi. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi Edisi XII Th. 2018. Surabaya: Universitas Adi Buana Surabaya.
- Wagiran. 2019. Metode Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi). Sleman: CV Budi Utama.
- Widiyanti. 2017. Tinjauan Teoritis Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan Dibandingkan Dengan Upah Minimum Provinsi Dki Jakarta Sesuai Dengan Peraturan Gubernur Dki Jakarta No. 176 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. (Studi Kasus Di Wilayah Jakarta). Banten: Universitas Pamulang.
- Wikipedia. Penghasilan Kena Pajak: [Www.Wikipedia.Org](http://www.Wikipedia.Org).
- Yitawati, Krista. 2015. Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Penyesuaian Besaran Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara. Jurnal yustisia merdeka, volume 1, nomor 2 (<http://www.unmermadiun.ac.id>, diakses tanggal 4 november 2019)